

**ANALISIS KINERJA KEUNGAN PEMERINTAH DESA BATU
KARAENG KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN
BANTAENG**

SKRIPSI

**OLEH
IRMAWATI
105730522315**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**ANALISIS KINERJA KEUNGAN PEMERINTAH DESA BATU
KARAENG KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN
BANTAENG**

SKRIPSI

**IRMAWATI
105730522315**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S1)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan untuk ...

- Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Semoga kelak cita-cita saya ini menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah H. Baddu dan Ibu Hj. Masniah, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

- Kakak dan Adik tercinta

Untuk Kakakku Syamsidar, Jabal dan adikku Ainul, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

- Dosen Pembimbing

Kepada Bapak amir dan Bapak Ismail Rasulong selaku dosen pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di Kampus. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

- Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta

Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk support dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



MOTTO HIDUP

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (QS. Albaqarah:286)
- Jangan berhenti berdoa karena kita tidak pernah tau doa kita yang keberapa yang akan Allah kabulkan.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu
Karaeng Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*

Nama Mahasiswa : IRMAWATI
No. Stambuk/NIM : 105 730 5223 15
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 September 2019 di Ruang
IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Amir, S.E., M.Si, AK, CA
NIDN : 0031 126404


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903078

Mengetahui,

Head of Prodi Akuntansi



Dr. Emili Effendi, S.E., M.Si, Ak, CA, CSP
NBM 9073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **IRMAWATI**, NIM **106730522315**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 30 Dzulhijjah 1440 H/ 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM
2. Faidul Adzim, SE., M. Si
3. Ramly, SE., M.Si
4. Mukminatli Ridwan, SE., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 25B Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 856972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmawati
Stambuk : 105700522015
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu
Kereang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skrripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

Yang membuat pernyataan,


IRMAWATI

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi


Ismail Badollahi, SF, M Si, Ak, CA, CSP
NBM : 903078


Dr. Ismail Badollahi, SF, M Si, Ak, CA, CSP
NBM : 1073428

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak H. Baddu dan Ibu Hj. Masniah. yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudaraku tercinta Syamsidar, Jabal Rahmat, S.Pd dan Ainul Aswar, yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi,SE.,M.SI.,AK.,CA., C.SP.selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amir, SE., M.,Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak Gafrawi, SE selaku Kepala Desa Batu Karaeng beserta Para Stafnya, yang telah memberikan pelayanan dan membantu memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi terutama kelas AK.2.15 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk semua sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran,

motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 2019

Penulis

ABSTRAK

Irmawati, 2019. **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng**. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Amir dan Pembimbing II Bapak Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa batu karaeng kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng yang ditinjau dari analisis rasio selama periode 2016 sampai dengan 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) tahun 2016 sampai tahun 2018 yang didapatkan dari laporan tahunan desa batu karaeng. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan desa, rasio Efektivitas dan rasio efisiensi. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa batu karaeng kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng untuk tahun 2016-2018 ditinjau dari aspek pengelolaan pendapatan asli desa dari rasio kemandirian keuangan desa sudah baik (tinggi), dari rasio efektivitas sudah sangat efektif dan ditinjau dari rasio efisiensi sudah sangat efisiensi.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, kemandirian keuangan desa, efektivitas, Efisiensi

ABSTRACT

Irmawati, 2019. Analysis of Government Financial Performance of Batu Karaeng Village, Pa'jukukang District, Bantaeng Regency. Thesis Faculty of Economics and Business, Accounting Department, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor I Mr Amir and Supervisor II Mr Ismail Rasulong.

This study aims to determine and analyze the financial performance of the Batu Karaeng village government of Pa'jukukang district, Bantaeng district, which is reviewed from the ratio analysis during the period of 2016 to 2018. The type of research used in this study is descriptive qualitative. The data processed is the village budget (APBDesa) from 2016 to 2018 obtained from the annual report from the Batu Karaeng village. Data analysis techniques used in this study were the ratio of village financial independence, effectiveness ratio and efficiency ratio. Based on data analysis, it can be concluded that the financial performance of Batu Karaeng village government, Pa'jukukang district, Bantaeng Regency for 2016-2018, viewed from the aspect of managing the village's original income from the village financial independence ratio is good (high), from the effectiveness ratio it has been very effective and in terms of efficiency ratio is very efficient.

Keywords: Village Government, village financial independence, effectiveness, efficiency

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR ATAU BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Akuntansi Sektor Publik.....	6
B. Sistem Pemerintahan.....	8
C. Laporan Keuangan	10
D. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	13
E. Pemerintahan Desa	15
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	17

G. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
H. Penelitian Terdahulu	25
I. Kerangka Pikir	27
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Sumber Data	29
D. Metode Analisis Data.....	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sejarah Singkat Desa Batu Karaeng.....	34
B. Hasil penelitian	43
C. Pembahasan	54
BAB V. PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	26
3.1	Tingkat Kemandirian Keuangan Desa	32
3.2	Kriteria Efektivitas Keuangan Desa	33
3.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	33
4.1	Batas Desa	36
4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Uisa Dan Jenis Kelamin	37
4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	37
4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Fasilitas Sosial, Ekonomi, Pendidikan, kesehatan, dan Sarana Jalan	40
4.7	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016	44
4.8	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017	45
4.9	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018	45
4.10	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa Batu Karaeng	47
4.11	Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Batu Karaeng	49
4.12	Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Batu Karaeng	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pikir	28
Gambar 2	Struktur Organisasi Desa Batu Karaeng	41



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Hasil Wawancara
3. dokumentasi
4. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukung Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016
5. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukung Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017
6. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukung Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Tata hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah mekanisme dan proses timbal balik antara unsur Pemerintah Provinsi dan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kepermerintahan yang baik. Pembentukan daerah otonom diatur bukanlah semata-mata pertimbangan politik yang memberikan kewenangan kepada daerah. Tetapi, merupakan pertimbangan kemampuan daerah ditinjau dari ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas daerah.

Pemerintah daerah sendiri dibagi menjadi Provinsi, dan Kabupaten/Kota, masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemerintah sendiri, untuk Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Kabupaten dipimpin oleh Bupati, dan Kota dipimpin oleh Walikota. Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dibantu salah satu wakil daerah dalam menjalankan tugasnya di pemerintah daerah. Untuk kabupaten dibagi lagi menjadi 2 yaitu: (1) Kecamatan, (2) Kelurahan/Desa.

Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggara pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya

adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Namun kenyataannya, kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu. Pengertian dari desa sendiri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Tujuan dari keuangan desa sendiri adalah berfokus pada pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan, kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat suatu keputusan. Untuk memahami posisi laporan keuangan yang baik adalah dengan menganalisis rasio keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan desa perlu adanya rasio keuangan karena kegunaannya sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja keuangan suatu pemerintah desa. Rasio-rasio yang digunakan akan membantu kinerja keuangan pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Kinerja laporan keuangan pemerintah desa yang baik maupun buruk akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBDesa secara bijaksana yang telah disediakan pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini, Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng menjadi objek yang akan diteliti. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBDesa yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas daerah yaitu rasio kemandirian keuangan Desa, rasio efektivitas dan rasio Efisiensi.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat pentingnya laporan keuangan maka penulis mengangkat judul yaitu” **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016-2018**“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan diidentifikasi adalah “Bagaimanakah Analisis

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng yang ditinjau dari analisis rasio selama periode 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian yang disajikan dalam penulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis

Penelitian ini bagi penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Periode 2016-2018 (Studi Kasus di Desa Batukaraeng). Selain itu proposal ini sebagai suatu bentuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa.

2. Pihak lain

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama bagi mereka yang tertarik untuk meneliti mengenai sejauh mana manfaat yang diberikan oleh Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Periode 2016-2018 (Studi Kasus di Desa Batukaraeng).

3. Bagi Pihak Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi sektor publik

Menurut V. Wiratna Sujarwani (2015:1) Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lain-nya yang sudah diatur dalam hukum. Contoh: transportasi, pendidikan, kesehatan.

Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dan publik di lembaga-lembaga tinggi di negara dan departemen-departemen dibawahnya.

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik telah muncul akhir- akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi

sebagai satu sisi lain dari akuntansi, mulai dirasa penting dalam pengajaran diperguruan tinggi. Sebelumnya, pembahasan akuntansi sektor publik ini dipersempit dan lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintahan.

Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia ditahun 1970-an lebih berkiblat di Amerika Serikat, di mana system perekonomiannya lebih terfokus pada swasta. Peranan Negara dalam perokonomian sangat minimal. Pemerintah sangat membatasi diri dalam kaitan program pemerintah dan ruang gerak institusi pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Akibatnya, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya hanya di lembaga pemerintahan. Karena itu, akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal dengan akuntans pemerintahan.

Akan tetapi, kondisi di Indonesia berbeda dengan di Negara-negara lain. Peranan akuntansi sektor publik seperti pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukannya telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Negara selama lebih dari lima puluh tahun ini. Jadi, pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan menimbulkan kekosongan pengaturan praktwek akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya harus dilakukan. Salah satu hal yang sangat substantial adalah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.

B. Sistem Pemerintahan

1. Pengertian sistem

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata “system” (stelsel dalam bahasa Belanda) secara leksikal dapat diartikan sebagai sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau sebagai cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu.
- b. Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “System” (bahasa Inggris) atau “systemata” (bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.
- c. Secara terminologi, sistem digunakan dalam berbagai cara yang luas sekali sehingga sulit untuk mendefinisikannya dalam suatu pernyataan yang merangkum semua penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk memenuhi maksudnya. Hal ini dikarenakan bahwa pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang mencoba mendefinisikannya. Misalnya, menurut hukum sistem dipandang dari aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan.

2. Pengertian Pemerintahan

Pengertian pemerintahan menurut para ahli (Sugiati, 2018:27-29) adalah sebagai berikut:

a. Menurut Soehardjo pemerintahan sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penegasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintah, badan-badan, instansi serta ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindakan aparat pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan dengan menenatkannya dengan fungsi perundang-undangan.

b. Vollenhoven mendefinisikan bahwa pemerintahan dalam arti luas (*bewindvoering*) atau "regeren yaitu:

1. Tindakan membuat peraturan (*regeling-wetgeving*)
2. Tindakan/kegiatan polisi (*politie*)
3. Tindakan/kegiatan peradilan (*rechtspraak*), dan
4. Tindakan Pemerintah/Pelaksana (*bestuur*)

Oleh Koentjoro Purbopranoto keempat pemerintahan dalam arti luas dari Van Vollenhoven tersebut dinamakan "*caturpraja*".

c. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan Negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan Negara. Lembaga Negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

d. Pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja artinya bahwa pemerintahan dalam arti sempit adalah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan (administrasi Negara). Atau dengan kata lain pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara.

C. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan (Faud, 2016: 5) adalah suatu laporan keuangan oleh pemerintah daerah yang tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah di baca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait. Laporan keuangan sudah merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah untuk membuat dan melaporkan laporan keuangannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi atau kondisi keuangan terkini. Kemudian, laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintah daerah sekarang dan kedepan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara berikut ini:

- a. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Peranan Pelaporan Keuangan

Secara umum, peranan pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Lampiran keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparasi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan antargenerasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

D. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Organisasi.

Wiratna (2015 :107) pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

2. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
4. Mewujudkan tanggung jawab publik.
5. Untuk mengkomunikasi strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan
6. Mengalokasikan sumber daya.
7. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri pengembangan pencapaian strategi.
8. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntansi publik.

3. Audit Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good Governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan menace pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat, DPR dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Penegndalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk

memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

E. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

pemerintahan Desa (Wiratna, 2015:121) merupakan Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa, yakni terdiri dari sekertaris desa dan perangkat lainnya. Adapun tugas dari perangkat desa diantaranya adalah:

- Tugas Kepala Desa adalah memimpin pemerintahan desa, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, membina perekonomian, mengkoordinasi pembangunan desa.
- Tugas Sekretaris Desa adalah menyusun rencana peraturan desa tentang APBDesa, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
- Tugas bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

- Tugas Kaur adalah membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang masing-masing.

2. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Keuangan desa tersebut terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Desa

- Hasil usaha desa
- Hasil kekayaan desa
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- Lain-lain pendapatan asli desa

2. Bagi Hasil Pajak Daerah

3. Bagian Dari Restribusi Daerah

4. Alokasi Dana Desa

5. Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga

b. Belanja Desa

1. Kelompok Belanja Langsung

2. Kelompok Belanja Tidak Langsung

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

2. Pengeluaran Pembiayaan

3. Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
- b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan.

Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian berdasarkan transaksi ini dicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyusain, neraca, neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.

- c. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1. Pengertian APBDesa

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (Hanif, 2011: 83) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan

masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah yang terlihat apa yang dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

2. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program tahunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi kepala desa terpilih.

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat tiga bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disangkutkan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPBDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa

berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPBDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan pemerintah desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat tiga hari kerja disampaikan kepada bupati/wakil kota untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.

Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Reperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lambat tujuh hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi

tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/wakil kota membatalkan peraturan desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota paling lambat tujuh hari kerja setelah pembatalan, kepala desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa yang menyangkut APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Rancangan peraturan desa tentang APBdesa ditetapkan oleh desa paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan. Dengan ditetapkan APBDesa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan berdasarkan APBDesa tersebut

3. Pelaksanaan APBDesa

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa wajib mengidentifikasi pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari pengguna bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

4. Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Keadaan darurat
- d. Keadaan luar biasa

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu

pergeseran antarjenis anggaran belanda dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan: 1)pendanaan keadaan darurat; 2) pendanaan keadaan luar biasa.

G. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio Keuangan (Faud, 2016:138) adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini, akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian, juga dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya

ekonomi secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah.

2. Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur, diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk rasio keuangan:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian keuangan desa ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli desa (PADes) dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya Misalnya Dana Bagi Hasil , Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Desa lainnya, Hibah, serta Sumbangan Pihak Ketiga.

Kemandirian desa ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian dan ketergantungan terhadap sumber dana eksternal (dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota).

Semakintinggi rasio kemandirian desa, tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal (dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) semakinrendah, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam berswadaya dan berpartisipasi yang merupakan komponen pendapatan asli desa. Semakin tinggi masyarakat berswadaya dan berpartisipasi menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Secara matematis dapat disimpulkan dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADES)}}{\text{Lain - Lain Pendapatan Asli Desa}}$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi pendapatan asli desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa.

Untuk menghitung rasio efektivitas maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADES}}{\text{Target Penerimaan PADES}}$$

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio Efisiensi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan Pades}}$$

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL PENULIS	METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN	HASIL PENELITIAN
1	Umi Yuniani (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa argodadi tahun anggaran 2010-2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010-2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010-2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.

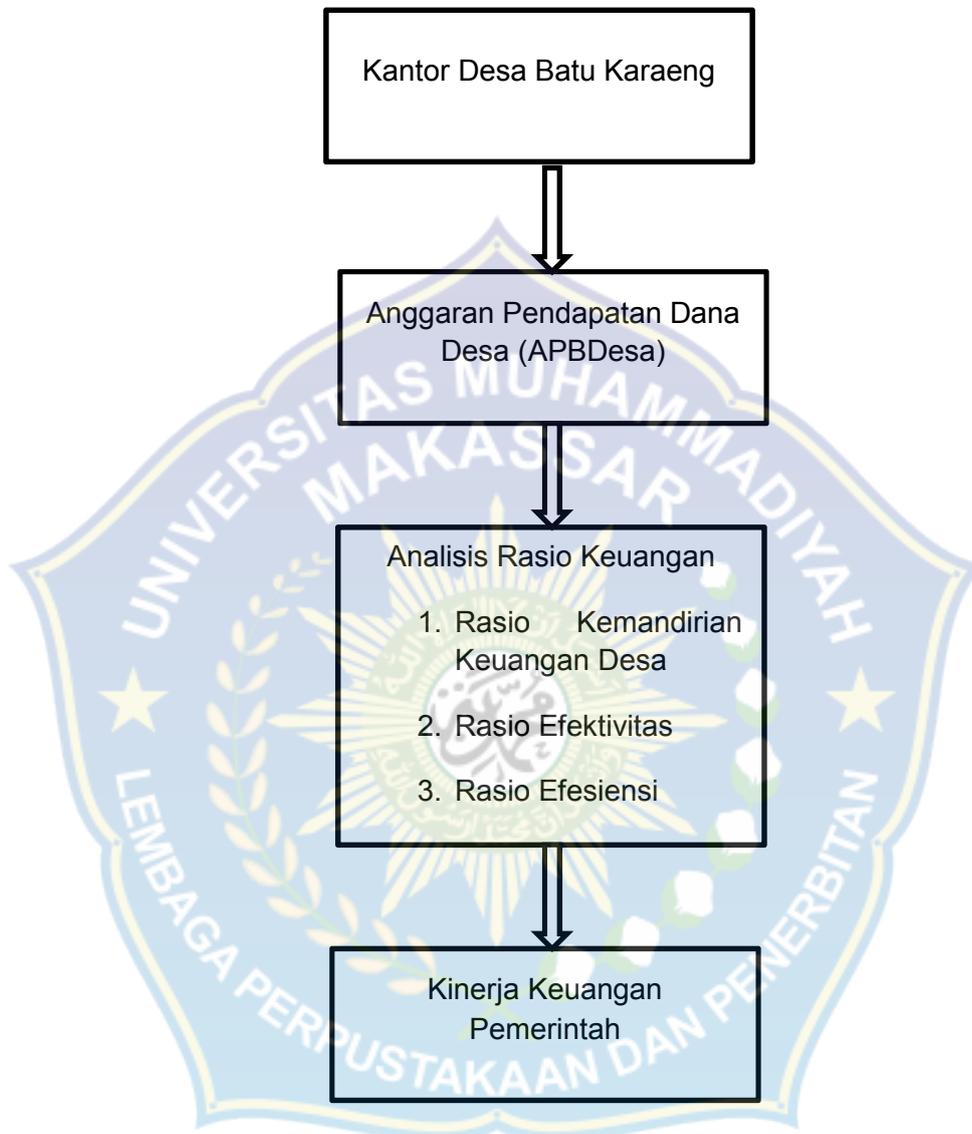
2.	Siti Ainul Wida, Dkk (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Bajuwangi	Kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di 9 desa dikecamatan rogojampi kabupaten bayuwangi tahun 2014 adalah (1) sistem akuntabilitas dalam perencanaan alokasi dana desa di 9 desa telah berlangsung sebesar 100% dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti akuntabilitas pengeloalaannya telah berlangsung dengan memuaskan.
3.	Novianti Ruru, dkk (2017)	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (studi kasus pada desa suwaan, kecamatan kalawat, kabupaten mihasa utara)	Kualitatif	Hasil penelitian di desa Suwaan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sudah sesuai dengan peraturan bupati minahasa utara No. 22 tahun 2016 tentang pemberian alokasi dana desa kepada pemerintah desa sekabupaten minahasa utara. Untuk 70% dari alokasi dana desa digunakan untuk bidang penyelenggara pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan 30% dari ADD sudah direalisasikan untuk operasional pemerintah desa.

4.	Nanang Rohman (2010)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya Terhadap Koordinasi UPTD dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa dan Efektivitas pembangunan Desa	Kuantitatif.	Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa berpengaruh terhadap koordinasi UPTD dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan efektifitas pembangunan desa. Sementara hasil pengujian sub hipotesis pengaruh implementasi kebijakan pembangunan desa secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap koordinasi UPTD.
5.	Dina Fitri Septarini, dkk (2016)	Analisis dana Pengelolaan gerbangku di kampung onggaru distrik malind	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan dana desa dikampung onggaru sudah cukup transparan dan akuntabel dengan partisipasi warga yang cukup proaktif dalam pelaksanaan disemua bidang pembangunan. Namun, besarnya alokasi dana pada masing-masing bidang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpanan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana untuk belanja pembangunan ditentukan sebesar 50% dan dianggarkan sebesar 84%.

H. Kerangka Pikir

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian keuangan Desa, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi untuk menilai kinerja pemerintah dalam satu periode.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Yang bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan.

C. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan tertulis, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan

kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang berbagai fenomena yang terjadi didalam masyarakat.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dengan cara menghitung menggunakan Rasio sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian Keuangan Desa ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Desa (PADes) dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya misalnya Dana Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Desa lainnya, Hibah, serta Sumbangan Pihak Ketiga.

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Lain - lain Pendapatan Asli Desa}}$$

Kemandirian desa ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian dan ketergantungan terhadap sumber dana eksternal (dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Semakintinggi rasio kemandirian desa, tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal (dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) semakinrendah, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam berswadaya dan berpartisipasi yang merupakan komponen pendapatan asli desa. Semakin tinggi masyarakat berswadaya dan berpartisipasi menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah desa digunakan tabel berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Kemandirian dan Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25
Rendah	25-50
Sedang	50-75
Tinggi	75-100

Sumber: Buku Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Anggaran Penerimaan PADes}}$$

Semakin Tinggi Rasio Efektivitas berarti kemampuan desa semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik.

Untuk menilai tingkat efektivitas keuangan pemerintah desa digunakan acuan pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Kriteria Efektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 – 100
Cukup Efektif	> 80 – 90
Kurang Efektif	> 60 – 80
Tidak Efektif	60

Sumber: Buku Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3. Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memungut Pades}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}$$

Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah desa semakin baik.

Untuk menilai tingkat efisiensi keuangan pemerintah desa digunakan acuan pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Kriteria Efisiensi kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% Keatas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

sumber: Buku Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Batu Karaeng

Desa Batu Karaeng adalah salah satu Desa di Kecamatan Pa'jukukang yang merupakan desa asih yang tergolong baru karena hasil pemekaran dari desa induk bernama desa biangloe, yang dulunya desa ini hanya sebuah yang terletak dibagian selatan desa biangloe. Desa Batu Karaeng merupakan desa kecil karena hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 3103 bujur sangkar dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1116 jiwa.

1. Letak Geografis

Desa Batu Karaeng adalah salah satu Desa di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang berjarak kurang lebih 10 Km Sebelah Utara Ibu Kota Kabupaten Bantaeng, serta kurang lebih 12 Km dari Desa Nipa-Nipa yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Pa'jukukang.

Luas Wilayah Desa Batu Karaeng kurang lebih 3,15 KM dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Biangloe
- Sebelah Selatan : Desa Rappoa dan Desa Lumpangan
- Sebelah Timur : Desa Lumpangan dan Kelurahan Tanah Loe
- Sebelah Barat : Desa Biangloe dan Desa Ulugalung

2. Visi Misi Desa Batu Karaeng

❖ Visi Desa Batu Karaeng

Kemandirian Desa Batu Karaeng sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal dan menjadi Desa Terkemuka di Wilayah di Kabupaten Bantaeng.

❖ Misi Desa Batukaraeng

Non Fisik:

1. Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang transportasi, baik jalur pertanian, perkebunan, warga dan lintas desa.
2. Membangun sarana olahraga yang layak bagi generasi muda, terutama volly dan sepak takraw.
3. Peningkatan sarana pelayanan dasar desa.
4. Fasilitas pengadaan pupuk bagi petani.
5. Penyusunan perencanaan Desa secara partisipatif.

Fisik:

1. Menciptakan aparat pemerintahan yang profesional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal.
2. Mendorong lembaga yang ada di desa dalam peningkatan kapasitas, penyiapan pasilitas dan pengelolaan biaya operasional kelembagaannya.
3. Fasilitas beasiswa anak sekolah SD, SLTP, SLTA bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.
4. Meningkatkan kapasitas kelompok PKK dan Majelis Taklim.
5. Membina Kelompok.

3. Administrasi Desa

Secara administrasi Desa Batu Karaeng terbagi atas 3 dusun yaitu Dusun Bonto Te'ne, Dusun Batu Karaeng, dan Dusun Ma'le'ro. Dimana pusat pemerintahan desa terletak di dusun batu karaeng . dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh unsur perangkat desa BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat) yang beranggotakan 7 orang LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mempunyai anggota sebanyak 8 orang. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus).

- Dusun Batu Karaeng Membawahi 2 RW dan 1 RK
- Dusun Bonto Te'ne Membawahi 2 RW dan 1 RK
- Dusun Ma'le'ro Membawahi 2 RW dan 1 RK

4. Batas Desa

Jarak Kecamatan	7 Km
Lama Tempuh Kecamatan	10 Menit
Jarak Kabupaten	10 Km
Lama Tempuh Kabupaten	15 Menit

Tabel 4.1 Batas Desa

5. Demografis Desa

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0 Sampai 12 Bulan	24
2	1 Sampai 5 Tahun	62
3	6 Sampai 10 Tahun	82
4	11 Sampai 15 Tahun	82

5	16 Sampai 20 Tahun	103
6	21 Sampai 25 Tahun	63
7	26 Sampai 30 Tahun	76
8	31 Sampai 35 Tahun	107
9	36 Sampai 40 Tahun	87
10	41 Sampai 45 Tahun	113
11	46 Sampai 50 Tahun	149
12	51 Sampai 55 Tahun	33
13	56 Sampai 60 Tahun	25
14	61 Sampai 65 Tahun	50
15	70 Tahun	20

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	550 Orang
2	Perempuan	566 Orang
3	Kepala Rumah Tangga	261 Orang

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	45
2	Tidak Pernah Sekolah	97
3	Tidak Tamat SD	46
4	Tidak Tamat SLTP	4
5	Tamat SD/Sederajat	170
6	Tamat SLTP/Sederajat	36

7	Tamat SMA/Sederajat	60
8	Tamat D1, D2 dan D3	2
9	Sarjana/S1	33
10	Master/S2	1
11	Doktor/S3	-

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil peninjauan diketahui bahwa jenis-jenis mata pencaharian pokok dan sampingan di Desa Batu Karaeng adalah :

- PNS
- Pengusaha
- Pedagang
- Petani
- Tukang Kayu
- Tukang Batu
- Perbengkelan
- Tukang Ojek
- Kerajinan Tangan
- Buruh Tani
- Buruh Bangunan

Serta beberapa warga yang merantau keluar daerah untuk mencari nafkah.

Khusus untuk potensi sumber daya alam ada beberapa hal yang sangat mendukung pendapat masyarakat yakni :

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	212
2	Buruh Tani	76
3	Buruh Swasta	5
4	Aparat Sipil Negara (ASN)	14
5	Honorer	37
6	Tni/Polri	5
7	Pedagang	4
8	Tukang Kayu/Batu	20
9	Peternak	31
10	Karyawan	-
11	Usaha Bengkel	4
12	Perawat	-
13	Bidang	5
14	Dokter	-
15	Sopir	1
16	Penjahit	4
17	Pengrajin	7
18	Ojek	4
19	Pensiunan	4

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

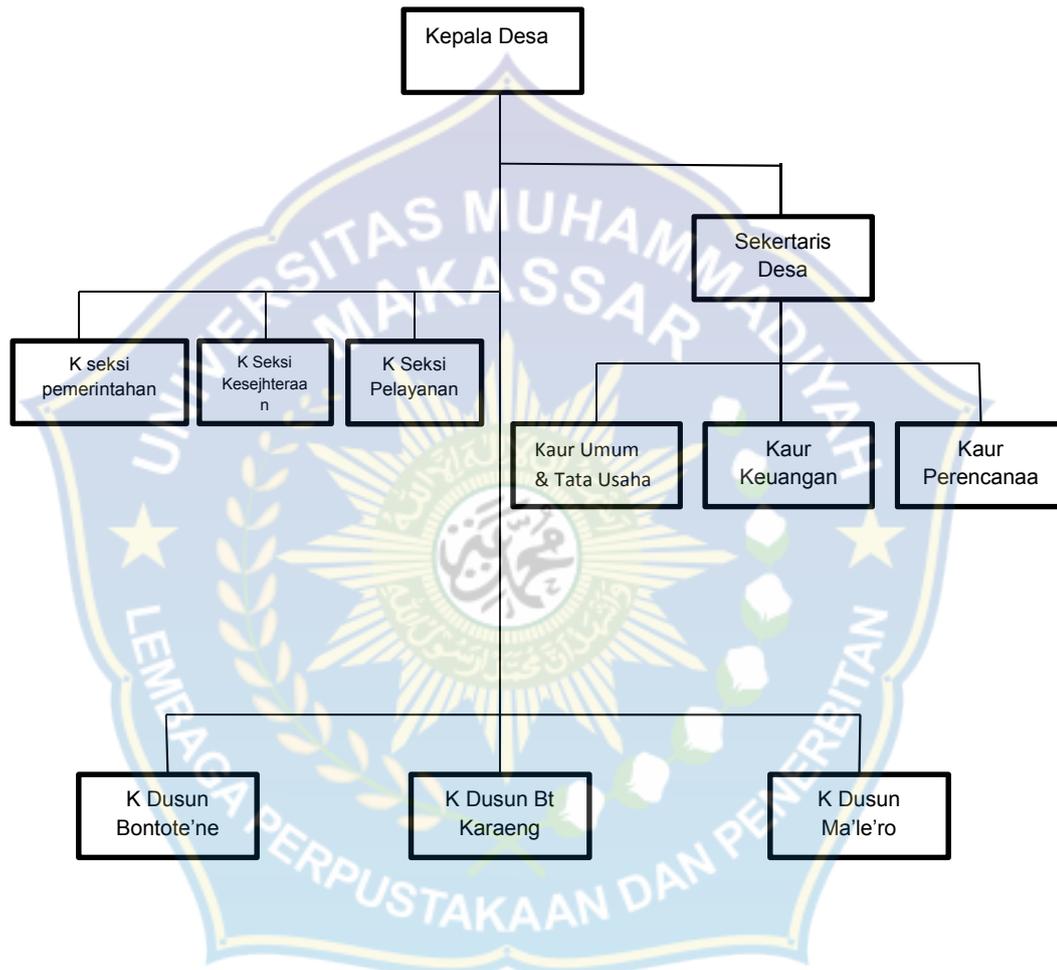
Fasilitas Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Sarana Jalan

1	Kantor Desa	1	1	Mesjid	
2	Kantor BPD	1		Mushollah	
3	Karang Taruna	1			
4	PKK	1			
5	LPM	1			
1	Gedung TK	-	1	Puskesmas	1
2	Gedung SD/Mis	2	2	Posyandu	2
3	Gedung SLTP	-			
4	Gedung SLTA	-			
1	Usaha Peternakan	4	1	Jalan Desa	
	Jumlah Tenaga Kerja	5 Orang			
2	Usaha Perkebunan	-	2	Rabat Beton	
	Jumlah Tenaga Kerja	-			
3	Klp. Simpan Pinjam	3 Klp	3	Perkerasan	
	Jumlah Tenaga Kerja	30 Orang			
4	Usaha Angkutan	3	4	Jalan Tani	
	Jumlah Tenaga Kerja	3 Orang			
5	Home Industri	7	5	Jembatan	
	Jumlah Tenaga Kerja	7 Orang			
6	Usaha Pertanian	-	6	Pangkala Ojek	

	Jumlah Tenaga Kerja	-			
--	---------------------	---	--	--	--

Tabel 4.6 Fasilitas Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Sarana Jalan

6. struktur Pemerintahan Desa Batu Karaeng



gambar 2 Struktur Organisasi

Daftar Perangkat Desa Batu Batu Karaeng:

- Kepala Desa : Gafrawi, SE
- Sekretaris Desa : Darmawati, S.Ag

- Kaur Umum dan Tata Usaha : Nurani, SE
 - Staf : Nikmawati, SE
 - Staf : Nurmi
- Kaur Keuangan : Nurfajri, SH
 - Staf : Erni, SE
 - Staf : Nursiah, S.Pdi
- Kaur Perencanaan : Kartina
 - Staf : Nuridawati
 - Staf : Eka Santi
- Kepala Seksi Pemerintahan : Fitra Arpiandi, S.Sos
- Kepala Seksi Kesejahteraan : Hamka S.Pdi
- Kepala Seksi Pelayanan : Farida
- Kepala Dusun Bontote'ne : Sangkala
- Kepala Dusun Batu Karaeng : Syamsul Mubarak
- Kepala Dusun MA'le'ro : H. Sirajuddin

Tugas Pemerintah Desa

- Tugas Kepala Desa adalah memimpin pemerintahan desa, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, membina perekonomian, mengkoordinasi pembangunan desa.

- Tugas Sekretaris Desa adalah menyusun rencana peraturan desa tentang APBDesa, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
- Tugas bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa.
- Tugas Kaur adalah membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang masing-masing.

B. Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng yang dibahas pada penulisan ini mengacu pada analisis rasio yang informasinya diperoleh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) periode 2016-2018. Untuk dapat mengetahui kinerja keuangan maka dilakukan perhitungan rasio keuangan yang dapat menunjukkan keuangan desa secara menyeluruh. Dalam menghitung rasio keuangan pemerintah desa maka dibutuhkan suatu laporan keuangan dari desa yang bersangkutan. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui seberapa jauh perkembangan pemerintah desa dan dari hasil analisis tersebut maka akan dapat memberikan manfaat dalam menetapkan kebijaksanaan yang lebih terarah.

Adapun rasio keuangan yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa batu karaeng kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng adalah rasio kemandirian keuangan desa, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDesa) selama 3 tahun yakni tahun 2016 sampai pada tahun 2018, maka selanjutnya akan disajikan perhitungan rasio untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa batu karaeng.

Berikut data laporan keuangan pemerintah desa batu karaeng kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng periode 2016-2018.

1. Data Laporan Keuangan Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Banataeng tahun 2016-2018

a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016.

Tabel 4.7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2016

No	Keterangan	Tahun 2016
A	Pendapatan	Rp. 1.049.211.760,00
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.000.00,00
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.047.211.760,00
B	Belanja	Rp. 1.052.466.768,00
1	Belanja Operasi/Tidak langsung	Rp. 19.665.000,00
2	Belanja Modal/Langsung	Rp. 6.920.000,00

Sumber: Bag. Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng

b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017

Tabel 4.8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2017

No	Keterangan	Tahun 2017
A	Pendapatan	Rp. 1.203.486.414,00
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.000.00,00
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.201.486.414,00
B	Belanja	Rp. 1.211.551.618,00
1	Belanja Operasi/Tidak langsung	Rp. 32.095.000,00
2	Belanja Modal/Langsung	Rp. 20.292.000,00

Sumber: Bag. Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng

c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018

Tabel 4.9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2018

No	Keterangan	Tahun 2018
A	Pendapatan	Rp. 1.554.687.125,00
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.059.000,00
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.552.628.125,00
B	Belanja	Rp. 1.559.663.609,00
1	Belanja Operasi/Tidak langsung	Rp. 18.306.000,00
2	Belanja Modal/Langsung	Rp. 42.816.204,00

Sumber: Bag. Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng

2. Analisi Data

Analisis kinerja keuangan desa batu karaeng kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng adalah proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerja/kegiatan desa batu karaeng dalam bidang keuangan selama periode 2016-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan desa batu karaeng adalah rasio kemandirian keuangan desa, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Untuk lebih jelasnya peneliti sudah menjabarkan hasil penelitian menggunakan rasio diatas sebagai berikut.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio Kemandirian Keuangan Desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian Keuangan Desa ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Desa (PADes) dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya misalnya Dana Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Desa lainnya, Hibah, serta Sumbangan Pihak Ketiga.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Desa} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Lain - Lain Pendapatan Asli Desa}} \\ &= \frac{1.049.211.760,00}{1.500.000,00} \end{aligned}$$

$$= 70\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Desa} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Lain - Lain Pendapatan Asli Desa}} \\ &= \frac{1.203.486.414,00}{1.500.000,00} \end{aligned}$$

$$= 68\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Desa} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Lain - Lain Pendapatan Asli Desa}} \\ &= \frac{1.554.687.125,00}{1.500.000,00} \end{aligned}$$

$$= 100\%$$

Tabel 4.10

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa Batukaraeng

Tahun	Pendapatan Asli Desa (PADes) (Rp)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2016	1.049.211.760,00	1.500.000,00	70%
2017	1.203.486.414,00	1.500.000,00	68%
2018	1.554.687.125,00	1.500.000,00	100%

Sumber: Bag. Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng

Keterangan:

Pendapatan Asli Desa

- Anggaran Dana Desa (ADD)
- Dana Desa
- Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan Asli Desa
- BUMDES

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

- Lain-lain pendapatan asli desa

Berdasarkan Analisis Perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Desa pada tabel 4.10 diatas, pemerintah desa batu karaeng tingkat kemandirirannya pada tahun 2016 sebesar 70% kemudian pada tahun 2017 rasio kemandirian desa mengalami penurunan sebesar 68% dan pada tahun 2018 rasio kemandirian keuangan desa mengalami peningkatan sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan keuangan pada tahun 2016 sudah tinggi dan 2017 menjadi Sedan dan 2018 tingkat kemampuan keuangannya menjadi tinggi.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa.

1. Rasio Efektivitas tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \\ &= \frac{1.049.211.760,00}{1.047.211.760,00} \\ &= 100,19\% \end{aligned}$$

2. Rasio Efektivitas tahun anggaran 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \\ &= \frac{1.203.486.414,00}{1.201.486.414,00} \\ &= 100,16\% \end{aligned}$$

3. Rasio Efektivitas tahun anggaran 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \\ &= \frac{1.554.687.125,00}{1.552.628.125,00} \\ &= 100,13\% \end{aligned}$$

Tabel 4.11

Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Batu Karaeng

Tahun	Realisasi Penerimaan PADes (Rp)	Target PADes (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2016	1.049.211.760,00	1.047.211.760,00	100,19%
2017	1.203.486.414,00	1.201.486.414,00	100,16%
2018	1.554.687.125,00	1.552.628.125,00	100,13%

Sumber: Bag. Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng

Keterangan:

Realisasi Penerimaan PADes (Pendapatan)

- Anggaran Dana Desa (ADD)
- Dana Desa
- Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan Asli Desa
- BUMDES

Target PADes (Dana Transfer)

Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, bahwa Pemerintah Desa Batu Karaeng pada tahun 2016-2018 sangat Efektif. Dapat dilihat dari 100,19% pada tahun 2016, 100,16 pada tahun 2017, dan 100,13% pada tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pemerintah desa batu karaeng pada tahun 2016-2018 sangat efektif dalam pengelolaan PADes_nya.

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

1. Rasio Efisiensi Desa Batu Karaeng Tahun Anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya Memungut PADes}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}} \\ &= \frac{1.052.466.768,00}{1.049.211.760,00} \\ &= 31,02\% \end{aligned}$$

2. Rasio Efisiensi Desa Batu Karaeng Tahun Anggaran 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya Memungut PADes}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}} \\ &= \frac{1.211.551.618,00}{1.203.486.414,00} \\ &= 67,01\% \end{aligned}$$

3. Rasio Efisiensi Desa Batu Karaeng Tahun Anggaran 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya Memungut PADes}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}} \\ &= \frac{1.559.663.609,00}{1.544.687.125,00} \\ &= 32,00\% \end{aligned}$$

Tabel 4.12

Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Batu Karaeng

Tahun	Biaya Memungut PADes (Rp)	Realisasi Penerimaan PADes (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2016	1.052.466.768,00	1.049.211.760,00	31,02%
2017	1.211.511.618,00	1.203.486.414,00	67,01%
2018	1.559.663.609,00	1.554.687.125,00	32,00%

Sumber: Bag. Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng

Keterangan:

Biaya Memungut PADes (Belanja)

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- Belanja Pegawai

Realisasi Penerimaan PADes (Pendapatan)

- Anggaran Dana Desa (ADD)
- Dana Desa

- Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan Asli Desa
- BUMDES

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, rasio efesiensi mengalami penurunan efesiensi dari 3102% di tahun 2016 menjadi 67,01% di tahun 2017, dan mengalami kenaikan dari 32,00% di tahun 2018.meskipun pernah mengalami penurunan ditahun 2017 namun rasio efesiensi tersebut masih menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Batu Karaeng dalam mengelolah asli desanya sudah sangat efesien. Karena hasil rasio efesiensi kurang dari 60%



Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa Batu Karaeng

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan Desa Batu Karaeng sudah tinggi, dimana dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah baik karena rasionya sebesar 70% pada tahun 2016, 68% pada tahun 2017 dan 100% pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena bantuan pusat yang diterima oleh desa batu karaeng lebih besar daripada Pendapatan Asli Desa (PAD).

2. Rasio Efektivitas Desa Batu Karaeng

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan desa batu karaeng sudah sangat efektif. Dapat dilihat dari 100,19% pada tahun 2016, 100,16 pada tahun 2017, dan 100,13% pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena realisasi pendapatan desa batu karaeng yang diterima lebih besar daripada anggaran desa dan pemerintah desa batu karaeng juga sangat efektif dalam pengelolaan PADes-nya pada tahun 2016-2018.

3. Rasio Efisiensi Desa Batu Karaeng

Berdasarkan perhitungan tabel 6 dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan desa batu karaeng sangat efisiensi. Meskipun pernah mengalami penurunan efisiensi dari 31,02% di tahun 2016 menjadi 67,01% di tahun 2017, Hal ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan

oleh desa batu karaeng untuk mendapatkan PAD lebih besar dari pada PAD yang diterima. Dan mengalami kenaikan dari 32,00% di tahun 2018, hal ini terjadi karena realisasi PAD yang diterima oleh desa batu karaeng lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Meskipun pernah mengalami penurunan di tahun 2017 namun rasio efisiensi tersebut masih menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Batu Karaeng dalam mengelolah asli desanya sudah sangat efisien. Karena hasil rasio efisiensi kurang dari 60%.

Berdasarkan analisis data dapat dinyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Untuk Tahun 2016-2018 ditinjau dari aspek pengelolaan pendapatan asli desa dari Rasio Kemandirian Keuangan Desa sudah baik (tinggi), dari Rasio Efektivitas sudah sangat efektif dan ditinjau dari Rasio Efisiensi sudah sangat Efisiensi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Desa Batu Karaeng jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Desa sudah sangat tinggi. Pada tahun 2016 memperoleh nilai sebesar: 70%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar: 68%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar: 100%. Artinya ketergantungan Desa Batu Karaeng dengan bantuan Pusat sudah sangat rendah dalam menjalankan sistem pemerintahannya.
2. Kinerja Keuangan Desa Batu Karaeng jika dilihat dari Rasio Efektivitas sudah sangat Efektif. Pada tahun 2016 memperoleh nilai sebesar: 100,19%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100,16%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar: 100,13%. Artinya Desa Batu Karaeng sudah sangat baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga lebih besar dari Anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dianggarkan.
3. Kinerja Keuangan Desa Batu Karaeng jika dilihat dari Rasio Efisiensi sudah sangat Efisiensi. Pada tahun 2016 memperoleh nilai sebesar: 31,02%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 67,01%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar: 32,00%. Artinya realisasi

PAD yang diterima oleh desa batu karaeng lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan



B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah sehubungan dengan kondisi keuangan pada Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng diantaranya sebagai berikut.

1. Dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa Rasio kemandirian keuangan desa, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi sudah sangat baik. Meski demikian, Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng harus tetap mempertahankan kinerja keuangannya agar lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng harus lebih baik lagi dalam memperhatikan pengeluarannya dalam Belanja Operasional dan Belanja Modal supaya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng juga diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Desa-nya (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Desa, sehingga ketergantungan pendapatan dari pihak eksternal (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) bisa semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Dina, F. S., Elisabeth, L. R. K .2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Dikampung Onggari Distrik Malind. *Journal*. Volume 07. Nomor 01
- Faud. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor. Penerbit: Ghalia Indonesia
- Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Bumi Aksara
- Mardiosmo, A. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta
- Mardiosmo, B. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. C. Vandi Offset
- Nanang Rahman. 2010. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya Terhadap Koordinasi UPTD Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa. *Journal*. Volume 02. Nomor 01
- Novianti, R., Litje, K., Novi, S.B. 2017. Analisis Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan, kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Journal*. Volume 12. Nomor 01
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, PT. Gelora Aksara Pratama
- Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta. Penerbit: Unit Penerbit dan Percetakan
- Siti, A. W., Djoko, S., Taufik, K. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal*. Volume 04. Nomor 02

Sugiati, et al. 2018. *Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Cetakan Ke-1. Penerbit: Pustaka As Salam. Diponegoro.

Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Pres. Yogyakarta

Umi Yuniarto. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Journal*. Volume 03. Nomor 03

Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo, Jakarta





Lampiran 1

Daftar Wawancara Oleh Kepala Desa Batu Karaeng

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai oleh APBDesa?
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDesa?
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDesa?
6. Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa?
7. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
8. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga diinformasikan kepada masyarakat?
9. Apakah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap akhir waktu diserahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan?
10. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Peneliti :Bagaimana pemerinta desa dalam mewujudkan prinsip tr dalam prosos perencanaan pengelolaan APBDesa?

Kepala Desa :prinsip transparansi dalam proses APBdesa, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa terkait apa yang dilakukan sebelumnya, dan mengadakan musrembang untuk melakukan pengkajian dan mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk membicarakan apa saja yang akan dibangun pada tahun yabg akan datang.

Peneliti :Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Kepala Desa :Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa, melibatkan beberapa pihak dalam hal pengelolaan APBDesa mulai dari Kepala dusun, RT, RW, dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Batu Karaeng. Selaku pemerintah desa tidak serta merta melskukan suatu program tanpa harus menerima kesepakatan atau usulan-usulan dari masyarakat Desa Batu Karaeng.

Peneliti :Bagaimana perang pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai oleh APBDesa?

Kepala Desa :jadi terkait dengan peran pemerintah desa dalam proses penyampaian informasi adalah papan atau baliho transparansi dimana terdapat semua yang didanai APBDesa, Dana Desa dan lain-lain sebagainya sudah tertera dalam baliho tersebut. Kemudian pada saat pertanggungjawaban kami tempelkan dipapan informasi yang ada dimasing-masing dusun dalam desa batu karaeng.

Peneliti : Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDesa?

Kepala Desa :jadi yang didanai APBDesa, seperti pemberian modal pada BUMDES (berlaku sudah 3 tahun), memberi bantuan kepada siswa yang kurang mampu (dilakukan selama 2 tahun), melakukan pelatihan mulai dari pelatihan tingkat 1, aparat desa, dan penyuluhan semua kelompok tani yang ada di Desa Batu Karaeng.

Peneliti :Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDesa?

Kepala Desa :jadi yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka pengelolaan APBDesa selaku pemerintah desa menghadirkan PMD, pihak kecamatan, BPD, aparat desa yang ada didesa batu karaeng. Masyarakat atau pemuda-pemuda desa batu karaeng.

Peneliti : Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa?

Kepala Desa : pertama kita merencanakan pendanaan APBDesa kemudian mengundang BPD untuk menyepakati hal tersebut setelah itu disampaikan kepada camat untuk ditindak lanjuti, selanjutnya merekomendasikan kepada bapak Bupati terkait pencairan dana desa yang tentunya bendahara sekertaris desa membuat suatu permohonan pencairan dana desa tersebut.

Peneliti : Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Kepala Desa : apa yang telah disepakati dalam musrembang telah dalam pelaksanaan program APBDesa sudah sesuai.

Peneliti : Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga diinformasikan kepada masyarakat?

Kepala Desa : LPPD dibuat oleh kepala desa bersama bendahara kemudian disampaikan kepada masyarakat.

Peneliti : Apakah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap akhir waktu diserahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan?

Kepala Desa : pelaporangnya kadan lewat batas yang telah ditentukan tapi terkadang batas waktunya hanya lewat 1 atau sampai 3 hari saja.

Peneliti : Apa saja jenis laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa?

Kepala Desa :Banyak, seperti LKPPD, LPPD, Laporan akhir tahun, Buku kas umum, buku rekafitalisasi.



Lampiran 3

Dokumentasi



Kantor Desa Batu Karaeng (Tempat Penelitian)



Wawancara Bersama Kepala Desa Batu Karaeng



RIWAYAT HIDUP



IRMAWATI, Lahir di Batu Karaeng , Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 04 Mei 1996. Anak ke 3 dari 3 bersaudara, Buah hati dari bapak H. Baddu dan ibu Hj. Masniah.

Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2009 di SD Inpres Batu Karaeng. Setelah tamat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMP) di Smp Negeri 3 Eremerasa dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat Sekolah Menengah Pertama kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bantaeng dan tamat pada tahun 2015. Setelah Tamat dari Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi . Kemudian Penulis menyelesaikan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar selama 4 tahun dan selesai pada tahun 2019.